

LATAR BELAKANG DAN KARAKTERISTIK PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN BATANG

(Studi Kasus di Lokalisasi Petamanan dan Penundan Kecamatan Banyuputih)¹

Sigit Prasetyo², Renita Heni Supyana², Sumarni³

¹Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian/riset Kabupaten Batang Tahun 2015.

²Universitas Negeri Semarang.

³Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi Keperawatan - Pekalongan.

Email: sigitsprasetyo@outlook.co.id

ABSTRAK

Pekerjaan adalah pintu gerbang untuk mendapatkan uang. Pekerjaan yang layak akan memberikan kesejahteraan bagi manusia. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan sempitnya lapangan pekerjaan kini menjadi masalah, sehingga timbul beberapa pilihan yang tidak layak seperti menjadi PSK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan karakteristik PSK di Kabupaten Batang serta tanggapan masyarakat terhadap keberadaan PSK.

Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lokalisasi Petamanan dan Penundan. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian diperoleh bahwa alasan atau faktor penyebab wanita menjadi PSK di Kabupaten Batang mayoritas adalah faktor ekonomi, walaupun ada faktor lain seperti frustrasi ditinggal suami, masalah keluarga, ditipu oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab, dan hura-hura. Rata-rata usia PSK berkisar 27-36 tahun atau sebanyak 56,98%. Pendidikannya sebagian besar tamatan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Warga asli Kabupaten Batang yang menjadi PSK sebanyak 31 orang dari jumlah keseluruhan yaitu 87 orang, sedangkan 56 orang berasal dari luar Kabupaten Batang, atau 64,37% adalah pendatang, sedangkan 35,63% adalah warga Kabupaten Batang. Tanggapan masyarakat Desa Banyuputih dan Desa Penundan lebih bersikap netral, acuh tak acuh, dan cenderung membiarkan (permisif), yang terpenting adalah mengikuti aturan yang diberikan oleh desa.

Saran, penggalakan pendidikan, menciptakan bermacam kesibukan, perluasan lapangan kerja, dan pendidikan seks. Selain itu juga dengan sosialisasi HIV/AIDS, penyempitan/penyatuan lokalisasi di Kabupaten Batang, pengadaan panti rehabilitasi di Kabupaten Batang, penerimaan eks-PSK, dan pembersihan warung remang-remang.

Kata Kunci : Latar Belakang, Karakteristik, Pekerja Seks Komersial (PSK).

PENDAHULUAN

Setiap manusia di muka bumi ini haruslah senantiasa berusaha dalam mempertahankan hidupnya. Seiring perkembangan zaman, populasi manusia semakin meningkat dan tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Pekerjaan adalah pintu gerbang untuk mendapatkan uang. Melalui uang tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya, namun permasalahan yang terjadi adalah pekerjaan apa yang sesuai dengan kemampuannya.

Tidak adanya pilihan sehingga terpaksa menjadi PSK kerap terjadi di negeri ini. Tidak perlu syarat khusus dan bermodalkan banyak uang apalagi *skill* tinggi, cukup dengan berdandan cantik, menarik dan berperilaku yang ramah. Banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa beberapa wanita memilih menjadi PSK. Alasan yang paling umum adalah faktor ekonomi. Lagipula tidak ada karakteristik seperti usia, pendidikan, dan lain sebagainya untuk menjadi seorang PSK.

PSK pun dinilai mengotori nilai perkawinan yang sejati, yaitu dengan melakukan hubungan seks di luar status perkawinan yang sah. Jelas bahwa pekerjaan menjadi PSK ini adalah sesuatu yang melanggar norma, namun yang dipikirkan dalam nalurinya adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak adanya pilihan sehingga menjadi PSK juga terdapat di Desa Banyuputih dan Desa Penundan. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dibuatlah kompleks khusus atau sering disebut lokalisasi.

Landasan Teori

“Istilah pelacur berasal dari dasar kata lacur, artinya adalah malang, celaka, gagal, sial, atau tidak jadi. Kata lacur berarti pula buruk laku. Bentuk kata dari kata lacur adalah melacur, yaitu berbuat lacur atau menjual diri sebagai pelacur. Orang yang berbuat lacur atau menjual diri itu disebut pelacur. Pelacur, sekali lagi, adalah orang yang melacur, orang yang melacurkan diri atau menjual diri” (Koentjoro dan Sugibastuti, 1999:30). Istilah pelacur seringkali disamakan dengan istilah wanita tunasusila (WTS). Bahkan, melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/HUK/96, pemerintah

lebih mengakui istilah WTS (wanita tuna susila).

Seiring dengan perkembangannya, istilah-istilah tersebut merambah mulai dari Pekerja Seks Komersial (PSK) hingga akhir-akhir ini sering terdengar dengan sebutan PL (Pemandu Lagu; biasanya juga tidak keberatan untuk “ngamar”)

Pekerja Seks Komersial atau PSK adalah perempuan yang melakukan hubungan intim di luar perkawinan, yang dilakukan dengan bebas liar dalam relasi seks dengan banyak orang, untuk mendapatkan imbalan materi, uang, ataupun tidak (Prastiwi, 2007). Walaupun terdapat pekerja seks komersial laki-laki, yang dimaksud PSK dalam penelitian ini adalah pekerja seks komersial perempuan.

Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan ungkapan yang telah diperhalus maknanya yang berasal dari kata pelacur. Kristanto dalam Prastiwi (2007) mengungkapkan “pelacur sendiri berarti perempuan atau laki-laki yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan intim diluar perkawinan baik dengan imbalan jasa maupun tidak”.

Gail Pheterson dalam Dreyfus (2013:8) menyatakan bahwa “*prostitute is the prototype of the stigmatized woman because she is defined by her unchastity which casts her status as impure*” (pelacur adalah bentuk asli dari wanita yang ternodai karena dia digambarkan oleh ketidaksuciannya yang memberikannya status kotor atau tidak suci).

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang Pasal 1 ayat 3 dijelaskan sebagai berikut. Pelacuran adalah perbuatan/kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci, yang menyediakan dirinya

kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dilakukan di hotel/penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.

Pelacuran atau prostitusi adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Dikemukakan oleh Narwoko dan Suyanto (2006:107) bahwa “perilaku menyimpang adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma, dimana tindakan-tindakan tersebut tidak disetujui atau dianggap tercela dan akan mendapatkan sanksi negatif dari masyarakat”.

Prostitusi sebagai perilaku menyimpang kerap dicari solusinya. Tentunya adalah solusi terbaik karena pada dasarnya PSK juga manusia yang mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Kartono (2013:257) mengemukakan bahwa “semakin ditekan pelacuran, maka akan semakin luas menyebar prostitusi tersebut”. Dalam teorinya yang lain masih dalam satu bukunya dikemukakan “apabila deviasi atau penyimpangan tingkah laku berlangsung terus-menerus dan jumlah pelacur menjadi semakin banyak menjadi kelompok-kelompok *deviant* dengan tingkah lakunya yang menyolok, maka terjadilah perubahan pada sikap dan organisasi masyarakat terhadap prostitusi. Terjadi pula perubahan-perubahan dalam kebudayaan itu sendiri. Stigma atau noda sosial dan eksploitasi-komersialisasi seks yang semula dikutuk hebat, kini berubah dan mulai diterima sebagai gejala sosial yang umum” (Kartono, 2013:258).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Lokalisasi Petamanan dan Lokalisasi Penundan. Fokus penelitian ini: (a) Latar belakang, dengan indikator: faktor internal, meliputi: faktor individu dan spiritual; faktor eksternal, meliputi: ekonomi dan lingkungan PSK di Lokalisasi Petamanan dan Penundan Kabupaten Batang; (b) Karakteristik, dengan indikator: umur; pendidikan; latar belakang keluarga; keyakinan/agama, dan; lingkungan PSK di Lokalisasi Petamanan dan Penundan Kabupaten Batang; (c) Tanggapan masyarakat Desa Banyuputih dan Desa Penundan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang terhadap keberadaan PSK. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang PSK

Pada tahun 2015 ini, lebih terperinci sampai akhir bulan November 2015 WPSL yang berada di Lokalisasi Petamanan Banyuputih sebanyak 44 WPSL (sumber data LSM FKPB – Batang) dan Lokalisasi Penundan 43 WPSL (sumber data Resos Penundan). Jumlah tersebut turun sangat signifikan dibandingkan dengan jumlah WPSL pada tahun 2011. Perbedaan jumlah yang sangat jauh berbeda dalam kurun waktu empat tahun dirasa sudah biasa. Pada dasarnya para PSK memang suka berpindah-pindah tempat mencari yang lebih ramai selain itu juga banyaknya kafe-kafe dan tempat karaoke baru di kawasan pantura yang dirasa lebih bergengsi dan meningkatkan tarif para PSK menjadi alasan para PSK berpindah dari lokalisasi satu ke lokalisasi yang lain, bahkan ke kafe atau tempat karaoke sebagai pemandu lagu.

PSK yang berada di Lokalisasi Petamanan dan Penundan Banyuputih dikatakan sebagian besar adalah pendatang, dalam arti lain tempat lokalisasinya adalah Lokalisasi Petamanan dan Penundan yang berada dalam wilayah Kabupaten Batang, akan tetapi PSK yang berada di lokalisasi tersebut sebagian besar adalah bukan warga Kabupaten Batang. Warga asli Petamanan dan Penundan yang berada di lokalisasi tersebut, mereka bekerja seperti buruh cuci, jualan air, jualan kecil-kecilan, dan yang lainnya. Warga asli daerah Kabupaten Batang yang menjadi PSK (studi kasus di lokalisasi Petamanan dan Penundan) sebanyak 31 orang dari jumlah keseluruhan yaitu 87 orang, sedangkan 56 orang berasal dari luar Kabupaten Batang, atau 64,37% adalah pendatang, 35,63% adalah warga kabupaten Batang.

PSK di Lokalisasi Petamanan Banyuputih cenderung tertutup ketika diminta untuk diwawancara. Dari data LSM FKPB jumlah PSK di lokalisasi sebanyak 44 PSK, peneliti mendapatkan 10 informan PSK di Lokalisasi Petamanan, dari 10 informan, 7 informan mengatakan bahwa alasan menjadi PSK adalah karena ekonomi, satu informan karena frustrasi ditinggal suami, satu informan karena dijebak dan dibohongi, dan satu informan lagi karena ingin hura-hura.

Pekerja Seks Komersial (PSK) pun ada karena adanya pengguna atau pelanggan dan permintaan. Seperti halnya PSK, pelanggan atau pengguna jasa PSK kecenderungan tertutup ketika diminta untuk diwawancara. Peneliti mendapatkan 6 pelanggan di Lokalisasi Petamanan Banyuputih. Berikut adalah ungkapan dari beberapa pengguna jasa PSK mengapa hingga akhirnya mereka menggunakan jasa PSK.

Bapak Yetno (nama samaran), berprofesi sebagai supir truk yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur, mengungkapkan mengapa menggunakan jasa PSK adalah sebagai berikut:

“Mau pulang kejauhan ya, perasaan ya, masak mau beli di sana, diemnya (tinggalnya) di sini”.

PSK di Lokalisasi Penundan Banyuputih dari data Resos Penundan sebanyak 43 PSK, peneliti mendapatkan 12 informan PSK di Lokalisasi Penundan, dari 12 informan, 8 informan mengatakan bahwa alasan menjadi PSK adalah karena ekonomi, 2 informan karena frustrasi ditinggal pacar/suami, satu informan karena masalah keluarga, dan satu informan lagi karena ingin hura-hura.

Grafik 1. Alasan Menjadi PSK di Kabupaten Batang



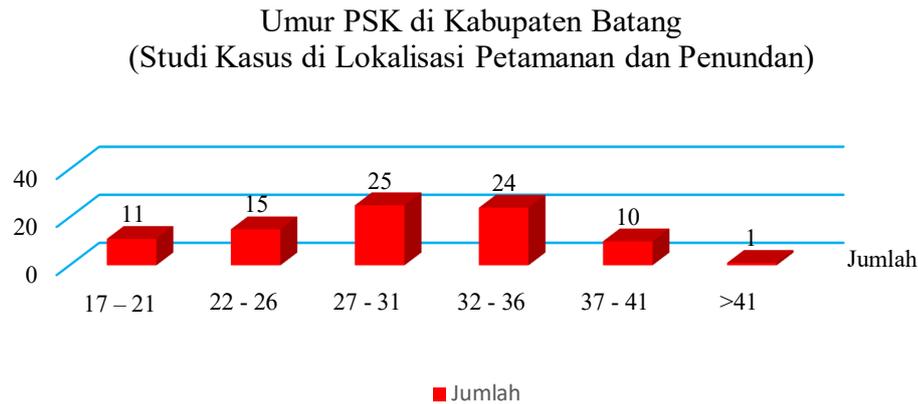
Latar belakang dari beberapa wanita memilih menjadi PSK di Kab Batang (Studi Kasus di Lokalisasi Petamanan dan Penundan Kecamatan Banyuputih) mayoritas adalah karena alasan atau faktor ekonomi. Alasan lain selain faktor ekonomi adalah karena frustrasi ditinggal suami, dijejek atau dibohongi seseorang yang

tidak bertanggungjawab, masalah keluarga, dan hura-hura.

Karakteristik PSK

Karakteristik PSK di Kabupaten Batang dari umurnya adalah berkisar antara 27-36 tahun atau sebanyak 56,98%.

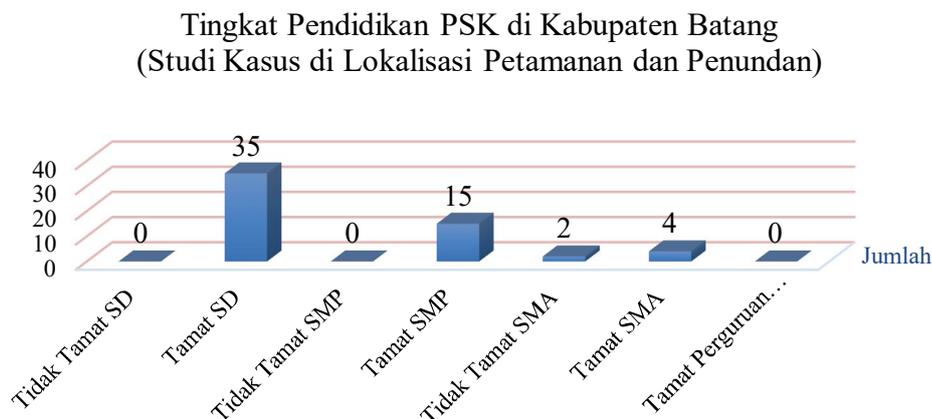
Grafik 2. Umur PSK di Kabupaten Batang.



Berikutnya adalah mengenai tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan tentu akan berpengaruh terhadap pemikiran atau sudut pandang seseorang. Pendidikan berperan penting dalam pengambilan keputusan seseorang wanita terlebih jika ingin menjadi PSK. Seorang yang berpendidikan

tinggi akan berpikir dua kali karena dengan syarat kelulusannya yang baik tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, berbeda jika hanya tamatan SD/ sederajat atau SMP/ sederajat, sedikit pula yang membutuhkan dengan kualifikasi tersebut.

Grafik 3. Tingkat Pendidikan PSK di Kabupaten Batang



Latar belakang keluarga juga menjadi salah satu faktor beberapa wanita terjerumus ke dunia prostitusi. Latar belakang keluarga menentukan bagaimana

tingkah laku anggota keluarganya di masyarakat. Dari 10 informan PSK di Lokalisasi Petamanan, 9 informan mengatakan bahwa mereka datang dari

latar belakang keluarga yang harmonis dan dengan orang tua yang lengkap namun untuk keluarga dari informan sendiri (yang sudah pernah menikah) saat ini semuanya sudah bercerai dan menghidupi anaknya dengan kerja kerasnya sendiri dan dengan bekerja sebagai PSK, dan hanya satu informan saja yang datang dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis.

Sedangkan di Lokalisasi Penundan, dari 12 informan PSK di Lokalisasi Petamanan, 10 informan mengatakan bahwa mereka datang dari latar belakang keluarga yang harmonis dan dengan orang tua yang lengkap namun untuk keluarga dari informan sendiri (yang sudah pernah menikah) saat ini semuanya sudah bercerai dan menghidupi anaknya dengan kerja kerasnya sendiri dan dengan bekerja sebagai PSK, satu informan datang dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis, dan satu informan datang dari keluarga yang *broken home* atau ayah dan ibunya bercerai.

Kemudian untuk masalah keyakinan/agama dari PSK dari data yang ada adalah Islam. Peneliti dalam hal ini tidak ada maksud atau tujuan tertentu, menjelekkkan suatu suku, agama, ras, adat/etnis mana pun. Semua data yang diambil adalah sesuai fakta lapangan dan hanya sebagai data administratif saja, sebagai bahan mengumpulkan data tanpa kepentingan apapun. Keyakinan atau agama adalah kunci seseorang dalam membentuk karakter dirinya. Dari 10 informan yang diwawancarai, 10 informan memeluk agama Islam. Hal tersebut juga dijumpai di Lokalisasi Penundan dari 12 informan juga beragama Islam. Memang ada yang secara terang-terangan mengaku Islam KTP, tetapi pada saat melaksanakan observasi pada tanggal 19 November 2015 peneliti melihat beberapa alat sholat wanita

yang dijemur di depan rumah-rumah (tempat karaoke sekaligus tempat PSK tinggal), hal tersebut memperlihatkan sisi lain dari kehidupan seorang PSK bahwa sebenarnya PSK tersebut tidak sepenuhnya buta akan agama, mereka sebenarnya tahu tetapi karena desakan ekonomi (beberapa informan) mereka harus bekerja untuk melacur.

Lingkungan di Lokalisasi Petamanan dan Penundan adalah lingkungan kompleks perumahan petak kecil lokalisasi pada umumnya. Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan tempat tinggal terdahulu dimana seorang PSK tinggal bersama orang tuanya atau suaminya. Lingkungan terdahulu PSK di Kabupaten Batang sebagian besar adalah petani. Selain itu juga dijumpai lingkungan lainnya seperti buruh, nelayan, usaha mebel, dan industri.

Karakteristik Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Batang (Studi Kasus di Lokalisasi Petamanan dan Penundan Kecamatan Banyuputih) dari umurnya adalah berkisar antara 27-36 tahun atau sebanyak 56,98%. Pendidikannya sebagian besar tamatan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Walau pun mereka datang dari keluarga yang harmonis, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi PSK karena faktor lainnya. Kemudian untuk masalah keyakinan/agama dari PSK dari data yang ada adalah Islam. Dijelaskan sekali lagi bahwa peneliti dalam hal ini tidak ada maksud atau tujuan tertentu, menjelekkkan suatu suku, agama, ras, adat/etnis mana pun. Semua data yang diambil adalah sesuai fakta lapangan dan hanya sebagai data administratif saja, sebagai bahan mengumpulkan data tanpa kepentingan apapun. Lingkungan terdahulu para PSK di Kabupaten Batang sebagian besar adalah petani. Selain itu juga

dijumpai lingkungan lainnya seperti buruh, nelayan, usaha mebel, dan industri.

Tanggapan Masyarakat Desa Banyuputih dan Desa Penundan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Tanggapan masyarakat Desa Banyuputih dan Desa Penundan terhadap adanya lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya adalah masyarakat cenderung membiarkan (permissif) adanya lokalisasi dengan alasan tidak mau ikut campur. Warga pun secara terang-terangan tidak apa-apa asalkan lokalisasi tersebut mengikuti aturan yang diberikan oleh desa. Jika masyarakat ingin menutup atau membubarkan lokalisasi dikhawatirkan selanjutnya adalah praktik prostitusi akan kembali terjadi seperti pada masa dahulu, yakni para PSK menjajakan dirinya di jalan-jalan pinggir pantura yang tidak elok untuk dipandang khususnya bagi anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap perkembangan moralnya.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat ada sedikit gangguan dari adanya PSK dan lokalisasi di sekitar tempat tinggal mereka, tetapi mereka lebih memilih sikap acuh tak acuh atau netral, karena itu bukan urusan mereka juga selama masih ada koordinasi dan mematuhi aturan yang diberikan oleh desa warga tidak keberatan.

Bapak Ahmad Nafis (staf ahli LSM FKPB) ketika ditanya mengenai tanggapan masyarakat di lingkungan Lokalisasi Petamanan dan Penundan terkait adanya prostitusi di wilayah tersebut mengungkap:

“Sebenarnya masyarakat itu menolak, dalam hati kecil mereka menolak kalau desanya itu ada prostitusi. Tak kira ditanya menanyakan tokoh masyarakat,

tokoh agama, siapa pun akan menolak, akan tetapi mereka berpikir ulang kalau mau dibubarkan itu kan bukan solusi nanti juga tidak akan menyelesaikan masalah, tambah masalah mereka akan menjajakan dirinya di jalan-jalan bahkan di alun-alun bahkan ada di suatu kota dibubarkan malah nongkrongnya (mangkalnya) di pendopo kabupaten kan tambah banyak masalah sehingga masyarakat sekitar juga berpikir ulang karena mereka juga punya kepentingan di situ, masyarakat sekitar juga banyak yang mencari rezeki di situ”.

Keberadaan PSK dan lokalisasi pada suatu daerah selalu menimbulkan tanggapan yang pro dan kontra, namun masyarakat yang kontra atau tidak setuju dengan keberadaan PSK atau lokalisasi di Petamanan dan Penundan masih terkendali dan tidak sampai ke “*action*” atau tindakan, dalam arti lain masyarakat masih bisa diatur dan dikendalikan, maka lokalisasi tetap ada tanpa terjadi perselisihan yang cukup berarti. Masyarakat tidak boleh hanya sekedar menolak tanpa memberikan solusi, karena jika lokalisasi ditutup dampaknya PSK akan menjajakan dirinya di jalan-jalan. Sebagai dampak bagi masyarakat adalah akan lebih banyak kerugiannya seperti merusak pemandangan kota, mengotori norma kesopanan, susila, dan agama, serta merusak sendi-sendi moral di masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang juga tidak menutup mata dengan adanya prostitusi di Kabupaten Batang. Dalam hal penanggulangan prostitusi di Kabupaten Batang, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah membuat Peraturan Daerah Kab. Batang No. 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah

Kabupaten Batang, Bab VIII Pasal 16 ayat 1 sampai 3. Selain itu dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang dan LSM FKPB Kabupaten Batang juga turut berpartisipasi dalam hal penanggulangan pelacuran di Kabupaten Batang. Berikut adalah ungkapan bapak Suwandi, S.E selaku staf ahli Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang:

“Program Dinas Sosial tadi awal sudah dikatakan dari setiap kegiatan baik dari LSM maupun Dinas Kesehatan setiap ada pertemuan dinas sosial selalu memberikan motivasi kepada calon atau baik yang eks (sudah berhenti) maupun yang masih aktif dan yang ingin kembali ke masyarakat akan diarahkan ke panti sosial (Solo) untuk mendapatkan pelayanan selama 6 bulan dalam bentuk seperti tata boga, penjahitan, rias pengantin. Semua dalam bentuk gratis baik asrama maupun makan nanti selama 6 bulan itu akan dapat modal”.

Kemudian terkait program rehabilitasi dari Dinsosnakertans Kabupaten Batang, berikut adalah pernyataan dari Bapak Suwandi, S.E:

“Dinas Sosial saat ini masih rehabilitasi, kemudian setiap minggunya atau setiap bulannya adalah tes kesehatan untuk memberikan suntikan IMS. Jadi setiap bulan di lokalisasi ini diadakan suntikan. Dinas Sosial untuk programnya itu hanya merehabilitasi saja manakala yang mau kembali ke masyarakat, kita katakan lagi Dinas Sosial siap untuk menerima dan menyalurkan untuk dikirim ke panti rehabilitasi sosial di Solo”.

LSM FKPB Kabupaten Batang, bapak Ahmad Nafis terkait program untuk

menangani prostitusi di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

“LSM itu kan dipendampingan, pendampingan itu artinya kita mendampingi mereka bagaimana mereka itu, satu, intinya mereka sehat, artinya mereka sehat itu ya sehat jasmani sehat rohani. Jasmaninya dia di situ harus sehat karena tidak mungkin cari uang kalau tidak sehat, yang kedua rohaninya, harapannya mereka itu ya setelah mungkin kerja di situ bisa menabung dan segera pulang ke kampung halaman. Kita LSM juga mengusahakan kepada mereka adanya pelatihan-pelatihan, harapannya mereka punya *skill* pulang dari situ dia mau pulang di rumah punya wirausaha, punya *skill* asalkan kita ajak mereka untuk pelatihan jahit, pelatihan salon, pelatihan tata boga, dengan harapan setelah dilatih *skill* nanti pulang bisa bekerja, seperti itu”.

PEMBAHASAN

Latar belakang Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Batang (Studi Kasus di Lokalisasi Petamanan dan Penundan Kecamatan Banyuputih) sebagian besar karena faktor ekonomi. Sulitnya ekonomi dan kemiskinan membuat beberapa wanita goyah dan masuk dalam dunia prostitusi. Alasan mengapa faktor ekonomi sebagai faktor utama adalah karena rendahnya tingkat pendidikan dari para PSK tersebut. Pendidikan yang hanya tamat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tentu sulit jika harus mencari pekerjaan. Apalagi dengan tamat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tersebut tidak dibekali dengan *skill* atau keterampilan tertentu, pasti sangat menyulitkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Kesadaran akan pendidikan yang masih rendah dan ketidakmampuan

orang tua untuk melanjutkan sekolah anaknya adalah alasan klasik yang sering terdengar mengapa tingkat pendidikan masih rendah, hal tersebut pula yang terjadi pada sebagian besar PSK di Lokalisasi Petamanan dan Lokalisasi Penundan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Sulitnya mencari pekerjaan di wilayah pantura yang jauh dari kota dan pabrik-pabrik yang menyerap tenaga kerja banyak juga menjadi salah satu alasan wanita terjun dalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan Bapak Ahmad Nafis, staf ahli dari LSM FKPB Kabupaten Batang bahwa sudah biasa ketika seorang suami mengantarkan istrinya untuk berangkat melacur pada sore hari dan menjemputnya pada pagi hari, itu dikarenakan tujuan dari pelacur tersebut mempunyai suami hanya untuk mendapatkan status di sini, yaitu KTP. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Resos Penundan.

Kartono (dikutip Kristanto dalam Prastiwi, 2007) bahwa setidaknya ada 5 faktor wanita masuk dunia pelacuran, dan faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Juga sejalan dengan apa yang dipaparkan La Pona (dalam Aprilianingrum, 2006: 39) dalam penelitiannya faktor pendorong memilih berprofesi sebagai PSK mengemukakan bahwa alasan paling utama untuk menjadi PSK adalah terbatasnya lapangan pekerjaan dan sulitnya memperoleh pendapatan yang memadai.

Kemudian untuk umur para PSK di Lokalisasi Petamanan dan Lokalisasi Penundan paling banyak berkisar 20-30 tahun, tetapi ada juga yang usia lebih dari 30 tahun masih melayani tamu. Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat ibu asuhnya (mucikari/germo; satu informan di Lokalisasi Petamanan) yang sedang sakit terkena stroke. Usia kisaran 20-30 tahun tersebut memang usia

yang sangat menjual bagi seorang PSK karena pada dasarnya seorang PSK hanya menjual kecantikannya. Pendidikannya pun rata-rata sekadar tamat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, maka jelas bahwa dengan tingkat pendidikan tamatan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tentu akan sangat sulit jika harus mencari pekerjaan. Tamatan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat belum dilatih *skill* atau keterampilan tertentu, ketrampilan dan keahlian yang mereka miliki hanya sekadarnya saja. Melihat latar belakang keluarga, mereka sebagian besar menjawab datang dari latar belakang keluarga yang harmonis walaupun dengan keadaan ekonomi yang sulit. Keyakinan atau agama mereka kesemuanya adalah Islam, walaupun dengan malu-malu mereka katakan bahwa Islamnya adalah Islam KTP. Sekali lagi, peneliti dalam hal ini tidak ada maksud atau tujuan tertentu, menjelekkkan suatu suku, agama, ras, adat/etnis mana pun. Semua data yang diambil adalah sesuai fakta lapangan dan hanya sebagai data administratif saja, sebagai bahan mengumpulkan data tanpa kepentingan apapun. PSK tersebut tahu tentang apa yang mereka kerjakan, tetapi keyakinannya tertutupi demi memperoleh makan, mempertahankan hidup, dan yang lebih penting adalah demi anak yang mereka hidupi sendiri tanpa ada ayahnya. Bahkan mereka masih menjalankan kewajibannya walaupun hanya kadang-kadang. Lingkungan terdahulu para PSK tersebut sebagian besar adalah petani. Sebagai seorang anak petani mereka mengakui kesulitan dalam hal ekonomi. Susah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan temannya selalu berganti-ganti *gadget*, berbelanja ini-itu, dan bersenang-senang. Mereka pun ingin hidup senang seperti itu, tetapi dengan pendidikan yang rendah, kemampuan yang minim, dan tidak adanya

modal untuk usaha membuat mereka mencari jalan pintas yakni dengan terpaksa menjadi PSK.

Prostitusi di tengah masyarakat tersebut tentu akan timbul berbagai tanggapan pro dan kontra. Warga masyarakat baik dari Desa Banyuputih atau pun Desa Penundan dengan adanya prostitusi dan lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya lebih bersikap netral, acuh tak acuh dan cenderung membiarkan (permisif), walaupun sebenarnya dalam hati kecil mereka menolak. Sudah seyogyanya jika masyarakat menolak adanya praktik prostitusi, bukan berarti tidak ada penolakan dari warga, tetapi karena itu terjadi sudah sangat lama dan lokalisasi yang ada di Dusun Petamanan juga berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Sebab itulah warga Dusun Petamanan Desa Banyuputih memilih bersikap netral, acuh tak acuh, dan cenderung membiarkan (permisif) dengan adanya lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian untuk Lokalisasi Penundan, sama dengan Lokalisasi Petamanan bahwa lokalisasi sudah ada terlebih dahulu, jadi masyarakat kesulitan apabila ingin membubarkannya. Mensikapi hal tersebut, di Desa Penundan terdapat Peraturan Desa yang mengisyaratkan bahwa lokalisasi hanya bisa atau terdapat dalam 1 Rukun Tetangga saja yaitu RT 01 RW 01 Desa Penundan.

Lokalisasi yang berada di dekat permukiman warga memang sedikit banyak menimbulkan gangguan seperti suara musik yang sangat keras sampai tengah malam dan juga sampai pada kekhawatiran terkait perkembangan moral anak dan remaja di sekitar. Pemerintah Desa Banyuputih pun menanggulangnya dengan aturan-aturan yang diberikan oleh desa sendiri seperti musik hanya boleh sampai pukul 24:00

WIB dan membuat kegiatan rutin keagamaan agar anak-anak dan remaja tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah demi sedikit menutupi rasa kekhawatiran para orang tua dan tentunya bagi penerus mereka warga Desa Banyuputih.

Kartono (2013: 258) menyatakan bahwa reaksi sosial itu bersifat menolak sama sekali dan mengutuk keras serta memberikan hukuman berat sampai pada sikap netral, masa bodoh dan acuh tak acuh serta menerima dengan baik.

Prostitusi di pantura Banyuputih sudah ada sejak dulu, bahkan dulu PSK “mangkal” di jalan-jalan dan membuat pemandangan yang tidak baik. Seiring perkembangannya, terdapat pangkalan truk di Desa Banyuputih dan Desa Penundan dan membuat warga berinisiatif untuk membuat tempat peristirahatan yang nyaman bagi para pelancong, dan seiring perkembangan pangkalan truk tersebut maka di situ lah para PSK diorganisir secara rapi dan tertib dan dilokalkan agar tidak terlihat jelas oleh masyarakat umum. Baik masyarakat Desa Banyuputih maupun Desa Penundan lebih bersikap membiarkan dengan adanya lokalisasi tersebut. Bukan berarti melegalkan prostitusi, tetapi lokalisasi adalah salah satu solusi dari pada harus ada prostitusi di jalan-jalan yang tentunya akan lebih mengkhawatirkan bahkan terlihat jelas oleh anak-anak dan remaja.

Narwoko dan Suyanto (2006:107) menjelaskan bahwa “perilaku menyimpang adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma, dimana tindakan-tindakan tersebut tidak disetujui atau dianggap tercela dan akan mendapatkan sanksi negatif dari masyarakat”.

Jelas bahwa pelacuran adalah perilaku menyimpang. Hubungan seks yang sesuai

dengan norma adalah hubungan seks melalui status perkawinan yang sah. Pelacuran yakni antara PSK dan pelanggannya tidak ada status perkawinan yang sah. PSK hanya bermotif menjual jasa dan pelanggan hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis dan setelahnya adalah selesai dalam arti tidak ada hubungan lagi. Maka pelacuran adalah tindakan yang menyimpang dan melanggar norma karena melakukan hubungan seks di luar status pernikahan yang sah. Dimana tindakan atau perilakunya menyimpang dari norma-norma dan tidak disetujui atau dianggap tercela oleh masyarakat, namun norma-norma tersebut terpaksa dilanggar oleh para PSK karena demi memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya adalah faktor-faktor internal seperti pikiran dan hati nurani pun akan dikalahkan dengan tekanan-tekanan (ekonomi dan sebagainya) tersebut.

Dari empat norma yang ada yakni norma agama, hukum, kesopanan, dan kesusilaan, sudah tentu PSK melanggar norma-norma tersebut. Norma agama, jelas bahwa melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan perkawinan (suami istri) adalah haram dan masuk dalam kategori berzina. Norma hukum, khususnya di Kabupaten Batang dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang maka jika masih ada PSK berarti hal tersebut adalah melanggar norma hukum. Kemudian norma kesopanan, norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Tata kehidupan atau budaya yang menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat Desa Banyuputih pada dasarnya adalah baik seperti masyarakat Indonesia pada umumnya yang menolak pelacuran, tetapi

kemudian terdapat lokalisasi yang secara tidak langsung melegalkan pelacuran. Lokalisasi di Dusun Petamanan dan Penundan adalah salah satu solusi untuk menanggulangi pelacuran di kawasan pantura khususnya Kabupaten Batang. Jadi, jelas bahwa PSK melanggar norma kesopanan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia agar manusia selalu berbuat kebaikan. PSK yang melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang sah adalah salah satu contoh perbuatan tercela. Maka PSK selain melanggar norma agama, norma hukum, norma kesopanan, juga melanggar norma kesusilaan.

Moral berarti bagaimana manusia menyebut manusia lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif, sedangkan penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Dijelaskan sekali lagi bahwa adanya lokalisasi di Desa Banyuputih dan Desa Penundan adalah sebagai solusi dari maraknya PSK-PSK yang menjajakan dirinya di pinggir jalan pantura yang terjadi sudah cukup lama. Tindakan melacurkan dirinya sendiri adalah contoh tindakan yang tidak bermoral dan tidak menghargai dirinya sendiri.

Akhirnya karena prostitusi sudah dianggap biasa karena terjadi berulang-ulang dan terus menerus, maka akan memperkuat penyimpangan (dalam hal ini prostitusi) dan yang ditakutkan adalah menjadi disorganisasi sosial atau keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu. Desa Banyuputih dan Desa Penundan adalah desa dengan faktor agama yang cukup kuat, prostitusi yang ada di sekitar tempat tinggal mereka masih bisa dikontrol hanya pada ruang lingkup lokalisasi saja, tidak merambah masuk ke lingkungan warga masyarakat.

Pemerintah desa baik Desa Banyuputih maupun Desa Penundan selalu berperan aktif dalam menangani masalah lokalisasi yang terdapat di desanya. Peran pemerintah desa di sini adalah sebagai penyeimbang dan penyalur aspirasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan warga masyarakat. Selalu dilakukan koordinasi antara warga masyarakat, warga kompleks lokalisasi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang agar masalah prostitusi ini dapat ditanggulangi dengan solusi terbaik. Penanggulangan dengan membubarkan lokalisasi bukan solusi terbaik, karena dampaknya prostitusi justru akan menyebar luas dan tidak terkontrol.

Penanggulangan pelacuran di Kabupaten Batang sudah baik. Sudah terdapat dasar hukum yakni undang-undang tentang pemberantasan pelacuran. Peraturan Daerah Kab. Batang No. 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang, Bab VIII Pasal 16 ayat 1 sampai 3 adalah salah satu cara untuk menangani pelacuran di Kabupaten Batang yang semakin berkembang. Cara lain menanggulangi pelacuran di Kabupaten Batang adalah dengan cara rehabilitasi dari Dinsosnakertrans Kabupaten Batang dan pendampingan (memberi motivasi dan keterampilan) dari LSM FKPB. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang merehabilitasi dengan cara menyalurkan para PSK atau eks PSK ke panti sosial yang ada di Solo. Selama 6 bulan PSK tersebut akan diberi keterampilan harapannya agar sepulang dari panti sosial PSK tersebut dapat kembali ke masyarakat dan hidup lebih produktif. LSM FKPB pun jelas bahwa dalam pendampingannya juga memasukkan adanya program pelatihan keterampilan kepada PSK-PSK yang ada di Kabupaten Batang.

Cara menanggulangi prostitusi di Kabupaten Batang yang sudah umum adalah melalui lokalisasi. Dalam bentuk lokalisasi semuanya terkontrol dengan baik. Mulai dari admistrasi (keanggotaan) hingga kesehatannya. Sebenarnya, dengan maraknya lokalisasi di Kabupaten Batang membuat warga sekitar resah akan perkembangan moral anak-anak dan remaja, khususnya di Desa Banyuputih dan Desa Penundan. Lokalisasi yang berdekatan langsung dengan warga membuat orang tua resah apabila anak-anak mereka ikut terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Orang tua harus memberikan perhatian ekstra kepada anak-anaknya agar perkembangan moralnya baik dan sesuai dengan tuntunan agama.

Tujuan akhir dari semua ini adalah para PSK diharapkan mampu menjadi manusia normal di masyarakat dengan tidak melakukan perilaku menyimpang yaitu melakukan hubungan seks di luar status perkawinan yang sah lagi. Para PSK juga telah diberi pelatihan dan keterampilan sebagai bekal awal untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu harus ada kerja sama antar masyarakat agar para eks-PSK ini dapat diterima kembali dan hidup berdampingan di masyarakat. Masyarakat harus menerima para eks-PSK dengan tangan terbuka sehingga tercipta masyarakat yang damai dan harmonis.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai latar belakang dan karakteristik Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Batang (Studi Kasus di Lokalisasi Petamanan dan Penundan Kecamatan Banyuputih) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang beberapa wanita memilih pekerjaan menjadi Pekerja Seks

Komersial (PSK) di Lokalisasi Petamanan dan Lokalisasi Penundan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang di antaranya adalah karena faktor ekonomi, frustrasi ditinggal suami, masalah keluarga, dijebak/ditipu/dibohongi seseorang yang tidak bertanggungjawab, dan hanya ingin bersenang-senang atau hura-hura. Mayoritas PSK di Lokalisasi Petamanan dan Lokalisasi Penundan adalah karena alasan atau faktor ekonomi.

2. Karakteristik Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Batang (Studi Kasus di Lokalisasi Petamanan dan Penundan Kecamatan Banyuputih) dari umurnya adalah berkisar antara 27-36 tahun. Pendidikannya tamatan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, hanya sebagian kecil tamat SMA/ sederajat. Walau pun mereka datang dari keluarga yang harmonis, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi PSK karena faktor lainnya. Kemudian untuk masalah keyakinan/agama dari PSK dari data yang ada adalah Islam. Peneliti dalam hal ini tidak ada maksud atau tujuan tertentu, menjelekkan suatu suku, agama, ras, adat/etnis mana pun. Semua data yang diambil adalah sesuai fakta lapangan dan hanya sebagai data administratif saja, sebagai bahan mengumpulkan data tanpa kepentingan apapun. Lingkungan terdahulu para PSK di Kabupaten Batang sebagian besar adalah petani. Selain itu juga dijumpai lingkungan lainnya seperti buruh, nelayan, usaha mebel, dan industri.
3. Tanggapan masyarakat Desa Banyuputih dan Desa Penundan terhadap adanya lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya adalah baik masyarakat Desa Banyuputih dan Desa Penundan cenderung membiarkan (permissif)

adanya lokalisasi dengan alasan tidak mau ikut campur. Warga pun secara terang-terangan tidak apa-apa asalkan lokalisasi tersebut mengikuti aturan yang diberikan oleh desa dan tidak saling mengganggu atau mengusik satu sama lain.

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti di antaranya mencakup 2 hal, yakni preventif dan represif.

1. Preventif

Saran preventif di antaranya: penggalakan pendidikan bagi generasi muda, menciptakan bermacam kesibukan bagi generasi muda (karang taruna, ikatan remaja masjid, dan lain-lain), perluasan lapangan kerja (BLK, pinjaman modal, dan sebagainya), dan pendidikan seks bagi generasi muda sekaligus pendidikan bahaya dari seks bebas hingga penularan virus HIV/AIDS.

2. Represif

Cara ini bisa dilakukan di antaranya dengan sosialisasi HIV/AIDS bagi PSK, penyempitan/penyatuan lokalisasi di Kabupaten Batang, pengadaan panti rehabilitasi di Kabupaten Batang, penerimaan eks-PSK, dan pembersihan warung remang-remang.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianingrum, Farida. 2006. 'Faktor Risiko Kondiloma Akuminata Pada Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus pada PSK Resosialisasi Argorejo Kota Semarang)'. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Dreyfus, Tom. 2013. '*Sex, Work, Law and Sex Work Law: Towards a Transformative Feminist Theory*'. An

Online Feminist Journal. Vol. 4, Issue
1. Melbourne: University of
Melbourne.

Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial-
Jilid 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koentjoro dan Sugibastuti. 1999. 'Pelacur,
Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks, dan
"Apa Lagi": Stigmatisasi Istilah'.
Jurnal Humaniora, No. 11 Mei –
Agustus 1999. Yogyakarta: Universitas
Gajah Mada.

Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto.
2006. *Sosiologi: Teks Pengantar &
Terapan*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang. 2011.
*Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pemberantasan Pelacuran
di Wilayah Kabupaten Batang*. Batang.

Prastiwi, Agnes Novita Andy. 2007.
'Kebutuhan-Kebutuhan Psikologis
Perempuan Pekerja Seks (Studi Kasus
Di Komplek Wisata Bandungan
Ambarawa)'. Skripsi. Semarang:
Universitas Katolik Soegijapranata.